

# Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

## *Analysis of the Effectiveness of Village Fund Management to Improve Local Economic Development in Klepu Village, Pringapus District, Semarang Regency*

Wilman Hasrat Harefa & Hendrajaya\*

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Indonesia

Diterima: 16 Juli 2025; Direview: 15 September 2025; Disetujui: 11 Oktober 2025

\*Coresponding Email: [hendrajaya@stiepari.ac.id](mailto:hendrajaya@stiepari.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Kajian difokuskan pada sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis didasarkan pada teori *good governance* dan pembangunan ekonomi lokal (*endogenous development*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaku usaha mikro, serta tokoh masyarakat, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa di Klepu telah berjalan partisipatif dan transparan melalui mekanisme musyawarah, serta berkontribusi terhadap peningkatan infrastruktur produktif, pemberdayaan usaha mikro, dan perluasan lapangan kerja. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan belum berfungsinya BUMDes secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, transparansi publik yang lebih luas, dan revitalisasi kelembagaan ekonomi desa agar pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Efektivitas; Pembangunan Ekonomi Lokal; Partisipasi Masyarakat; BUMDes.

### Abstract

*This article aims to analyze the effectiveness of village fund management in improving local economic development in Klepu Village, Pringapus District, Semarang Regency. The study focuses on how effectively this policy has promoted local potential-based economic growth and the factors influencing it. The analysis is based on the concepts of good governance and endogenous local economic development. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document studies involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), micro-entrepreneurs, and community leaders, then analyzed qualitatively using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that the governance of village funds in Klepu has been implemented in a participatory and transparent manner through deliberation mechanisms, contributing to the improvement of productive infrastructure, empowerment of micro-enterprises, and expansion of employment opportunities. However, its effectiveness remains suboptimal due to limited administrative capacity, low community participation in supervision, and the underperformance of village-owned enterprises (BUMDes). This study concludes that improving management effectiveness requires strengthening human resource capacity, enhancing public transparency, and revitalizing local economic institutions to ensure sustainable local economic development.*

**Keywords:** Village Fund; Effectiveness; Local Economic Development; Community Participation; BUMDes.

**How to Cite:** Harefa, W.H., & Hendrajaya. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 984-993.



## PENDAHULUAN

Pengalokasian dana desa melalui kebijakan nasional namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu terobosan strategis Pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur pemerintahan desa serta mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa dalam mengelola anggaran pembangunan secara mandiri melalui alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya di berbagai wilayah, efektivitas pengelolaan dana desa sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya sistem transparansi dan akuntabilitas publik (Ashsifa, I., Nur Hidayanti, A., & Mulyani, 2023); (Najoen, G., Laloan, C., & Kandori, 2022). Kelemahan-kelemahan tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi lokal menjadi aspek yang sangat strategis dalam konteks pembangunan desa. Konsep pembangunan ekonomi lokal menekankan pada peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan yang mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di lingkungannya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Melalui dana desa, pemerintah berupaya untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, memperkuat infrastruktur ekonomi seperti jalan desa, pasar rakyat, serta mendukung kegiatan produktif masyarakat yang bersifat kreatif dan berkelanjutan (Hidayatullah, R., & Putra, 2024); (Sartika, S., Wahyuni Mustafa, S., & Hadrah, 2020). Akan tetapi, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa meskipun dana desa telah dialokasikan cukup besar setiap tahun, dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa belum signifikan apabila pengelolaannya tidak efisien dan tidak terarah (Alfareza, T. Y., Dewi, K., Amelia, T. A., Mubarok, S., 2025); (Agusta, F. A., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang dikucurkan tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan berbasis kebutuhan lokal (Wahyudi et al., 2018).

Desa Klepu yang berada di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, merupakan salah satu desa dengan karakteristik ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, serta kegiatan usaha mikro dan kerajinan masyarakat. Sebagai bagian dari wilayah yang sedang berkembang, Desa Klepu menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pasar, serta rendahnya kemampuan manajerial pelaku usaha kecil. Dalam konteks tersebut, dana desa memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, sejauh mana dana desa telah dikelola secara efektif dan berdampak nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Desa Klepu masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Klepu dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi lokal. Mayoritas studi terdahulu lebih menekankan pada aspek akuntabilitas, transparansi, atau efektivitas administratif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan transformasi ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara pengelolaan dana desa dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggali secara mendalam proses, dinamika, serta persepsi para pemangku



kepentingan di tingkat desa mulai dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, hingga masyarakat penerima manfaat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Klepu.

Penelitian ini memiliki tiga fokus utama: pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Klepu, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban; kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, baik dari aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun transparansi; dan ketiga, untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan dana desa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di Desa Klepu. Dengan demikian, tujuan penelitian secara deskriptif adalah menguraikan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal di Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang melalui pendekatan kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### Landasan Teori

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Efektivitas pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. (Madjid, T., Waisitiono, S., Supriatna, T., & Prabowo, 2023) menjelaskan bahwa efektivitas dana desa sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar-lembaga desa, kejelasan regulasi, serta kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan publik.

Faktor transparansi dan akuntabilitas menjadi variabel utama dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. Penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek administratif, akuntabilitas, dan transparansi tetapi belum banyak yang menelusuri keterkaitan langsung antara efektivitas pengelolaan dana desa dan transformasi ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat. Cela ini menunjukkan adanya *research gap* empiris dan teoretis: secara empiris, masih terbatas bukti mengenai dampak tata kelola dana desa terhadap pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan; secara teoretis, hubungan sinergis antara prinsip *good governance* dan pendekatan *endogenous development* belum banyak diintegrasikan dalam satu model analisis (Ashsifa, I., Nur Hidayanti, A., & Mulyani, 2023) menegaskan bahwa mekanisme akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan juga terbukti memperkuat efektivitas kebijakan dana desa karena masyarakat menjadi bagian langsung dalam menentukan prioritas kegiatan (Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, 2022).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, konsep ini berakar pada teori *endogenous development*, yang menekankan bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah bergantung pada pemanfaatan sumber daya dan kapasitas internal daerah tersebut (Hidayatullah, R., & Putra, 2024). Dana desa dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa (Sartika, S., Wahyuni Mustafa, S., & Hadrah, 2020). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Agusta, F. A., 2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada komposisi dan kualitas belanja desa, apabila belanja terlalu dominan pada pembangunan fisik tanpa pemberdayaan ekonomi, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan dana desa juga bergantung pada aspek sosial kelembagaan di desa. (Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, 2025) menemukan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa hanya dapat berkelanjutan apabila ada mekanisme pengawasan sosial dan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dikelola secara profesional. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) ketepatan sasaran dan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat; (2) proses pelaksanaan sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi; (3) tingkat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban; serta (4) dampak



terhadap peningkatan ekonomi lokal, seperti bertambahnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan tumbuhnya usaha kecil di desa.

Logika teoretis dari hubungan tersebut adalah bahwa apabila pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka dana desa akan efektif mendorong pembangunan ekonomi lokal. Sebaliknya, jika tata kelola tidak berjalan baik, maka dana desa hanya akan menghasilkan output fisik tanpa memberikan outcome yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali makna dan persepsi para pelaku serta mendeskripsikan efektivitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi lokal di Desa Klepu secara kontekstual dan komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan dana desa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial serta pemaknaan subjek penelitian terhadap kebijakan pengelolaan dana desa dalam konteks lokal (Sugiyono, 2018).

Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku terkait pengelolaan dana desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang dipilih secara purposive karena merupakan salah satu desa penerima dana desa dengan karakteristik ekonomi lokal berbasis pertanian, kerajinan, dan usaha mikro. Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan dana desa, yaitu:

1. Kepala Desa Klepu, sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana desa.
2. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai unsur pengawas dan representasi masyarakat.
3. Pelaku Usaha Mikro Desa Klepu, sebagai penerima manfaat langsung dari program dana desa.
4. Tokoh Masyarakat atau Ketua Kelompok Tani/Pengrajin sebagai perwakilan masyarakat penerima dampak pembangunan ekonomi lokal.

Panduan wawancara semi-terstruktur disusun berdasarkan fokus penelitian untuk menggali informasi terkait proses, faktor penghambat dan pendukung, serta dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi lokal. Daftar lengkap pertanyaan disajikan pada *Supplementary File* sebagai dokumen pendukung

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa (Moleong, 2017). Setiap kategori informan hanya diwakili oleh satu orang informan kunci (key informant) agar data lebih fokus, mendalam, dan representatif terhadap peran masing-masing pihak. Jumlah empat informan kunci dianggap mencukupi karena data yang diperoleh telah mencapai titik jenuh (*data saturation*), ditandai dengan tidak munculnya informasi baru yang signifikan pada wawancara terakhir. Pemilihan informan juga mempertimbangkan keberagaman peran dalam struktur pemerintahan dan masyarakat desa, sehingga data yang terkumpul mampu mewakili perspektif utama dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer  
Diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan pengelolaan dana desa.
2. Data Sekunder



Bersumber dari dokumen peraturan desa, laporan realisasi dana desa, RPJMDes, APBDes, dan publikasi resmi pemerintah daerah.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, digunakan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan terhadap empat informan utama guna menggali informasi mendalam terkait proses, kendala, dan dampak pengelolaan dana desa. Setiap wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan pengembangan pertanyaan lanjutan sesuai konteks jawaban informan.

Pertanyaan Panduan per Informan:

- a. Kepala Desa
  - 1) Bagaimana proses perencanaan dan penentuan prioritas penggunaan dana desa di Desa Klepu?
  - 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
  - 3) Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan pemerintah desa?
  - 4) Sejauh mana dana desa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?
- b. Ketua BPD
  - 1) Bagaimana peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa?
  - 2) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi dana desa?
  - 3) Apa tantangan utama dalam menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi?
- c. Pelaku Usaha Mikro
  - 1) Apakah program dana desa memberikan manfaat nyata bagi usaha Anda?
  - 2) Bagaimana bentuk dukungan desa terhadap pengembangan usaha kecil?
  - 3) Apa kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan hasil program dana desa untuk pengembangan ekonomi lokal?
- d. Tokoh Masyarakat / Ketua Kelompok Tani
  - 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana desa?
  - 2) Apakah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
  - 3) Bagaimana dampak program dana desa terhadap kesejahteraan dan lapangan kerja di desa?

2. Observasi Partisipatif

Dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa. Observasi ini bertujuan melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Meliputi penelaahan terhadap laporan keuangan desa, notulen musyawarah desa, serta dokumen peraturan terkait pengelolaan dana desa. Teknik ini digunakan untuk memverifikasi dan melengkapi data dari wawancara serta observasi.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel kuantitatif, tetapi fokus pada indikator efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu:

- a. Ketepatan sasaran dan jenis kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Proses pelaksanaan sesuai tahapan dan regulasi.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
- d. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
- e. Dampak terhadap pembangunan ekonomi lokal, seperti peningkatan pendapatan, pengembangan usaha lokal, dan akses pasar.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Moleong, 2017), yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data penting terkait proses pengelolaan dana desa, kendala, serta dampak terhadap ekonomi lokal.

2. Penyajian Data (*Data Display*)



Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan bagan agar mempermudah pemahaman hubungan antar komponen penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menafsirkan makna data dan memverifikasi hasil temuan dengan teori efektivitas dan pembangunan ekonomi lokal.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh valid, konsisten, dan reliabel.

Model analisis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah hubungan antara efektivitas pengelolaan dana desa dengan pembangunan ekonomi lokal. Hasil analisis lapangan akan dibandingkan dengan kerangka teori serta hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang praktik pengelolaan dana desa di Desa Klepu dan implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Klepu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Klepu dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup lima tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Klepu, perencanaan dana desa dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Dalam forum Musdes, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini menjadi wujud nyata dari prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil musyawarah kemudian dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kepala Desa menjelaskan bahwa kegiatan prioritas tahun 2024–2025 difokuskan pada pembangunan jalan usaha tani, perbaikan irigasi pertanian, dan pemberian dukungan modal bagi pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Pemilihan program tersebut didasarkan pada potensi ekonomi utama Desa Klepu yang didominasi sektor pertanian dan usaha kecil rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui keputusan kepala desa. Pengawasan dilaksanakan oleh BPD dan masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil observasi lapangan, seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai dana desa diumumkan secara terbuka melalui papan informasi desa, media sosial resmi pemerintah desa, serta laporan hasil kegiatan yang dapat diakses masyarakat. Langkah ini menunjukkan adanya peningkatan transparansi publik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, hasil wawancara dengan Ketua BPD mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, terutama dalam hal sinkronisasi data kegiatan, keterlambatan pelaporan, serta keterbatasan kemampuan aparat desa dalam menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Beberapa laporan keuangan masih disusun secara manual, yang mengakibatkan proses penatausahaan menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ashsifa, Nur Hidayanti, dan Mulyani (2023) yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menjamin efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada aspek akuntabilitas administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola di Desa Klepu tidak hanya bergantung pada keterbukaan informasi, tetapi juga pada



kemampuan digitalisasi administrasi keuangan dan kolaborasi sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini memperluas pemahaman tentang praktik *good village governance* dalam konteks pembangunan ekonomi lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Klepu telah berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Namun, peningkatan profesionalisme aparatur desa, digitalisasi administrasi keuangan, serta penguatan mekanisme evaluasi masih sangat dibutuhkan agar efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat lebih optimal.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa, ditemukan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Klepu dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan kelembagaan dan regulasi.

a. Kapasitas Aparatur Desa.

Kepala Desa dan perangkatnya telah mengikuti beberapa pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan desa. Namun, tingkat pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintahan, pelaporan berbasis aplikasi, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban masih relatif rendah. Keterbatasan ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. Kondisi ini memperkuat temuan (Madjid, T., Waisitiono, S., Supriatna, T., & Prabowo, 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur dan kemampuan manajerial pemerintah desa.

b. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi warga Desa Klepu dalam proses perencanaan pembangunan cukup aktif. Banyak warga yang memberikan usulan kegiatan produktif seperti pengembangan usaha kecil, peningkatan sarana jalan tanah, dan kegiatan pelatihan keterampilan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat menurun pada tahap pengawasan dan evaluasi. Sebagian warga masih beranggapan bahwa tanggung jawab pengawasan merupakan tugas aparatur desa semata. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang mekanisme akuntabilitas sosial masih terbatas, sebagaimana juga ditemukan oleh (Waskito & Wulandari, 2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Sleman.

c. Transparansi dan Akuntabilitas.

Upaya transparansi telah dijalankan dengan menampilkan laporan kegiatan di papan informasi dan akun media sosial desa. Namun, laporan keuangan secara rinci belum dapat diakses oleh masyarakat luas. Tokoh masyarakat menilai perlu adanya forum evaluasi tahunan desa atau musyawarah publik terbuka untuk menyampaikan realisasi anggaran, hambatan pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas publik dapat lebih terwujud.

d. Dukungan Kelembagaan dan Regulasi.

Pemerintah Desa Klepu memperoleh pendampingan dari tenaga ahli kecamatan dan kabupaten, terutama dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan. Dukungan ini membantu memastikan kegiatan sesuai dengan regulasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa tetap menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian (Fatma et al., 2021) yang menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa sebagai pilar efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian (Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, 2022), yang menyoroti bahwa partisipasi masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap efektivitas penggunaan dana desa, terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan. Namun, studi mereka tidak banyak mengulaskan aspek kelembagaan dan dukungan regulatif yang dalam penelitian ini terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas fokus dengan menempatkan efektivitas dana desa



dalam konteks kolaboratif antara kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat berbasis tata kelola yang baik

Dengan mempertimbangkan keempat faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Klepu sangat bergantung pada sinergi antara kemampuan aparatur, partisipasi masyarakat, transparansi, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

#### Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Klepu memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan infrastruktur produktif, dukungan terhadap usaha mikro, dan penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan Infrastruktur Produktif.

Pembangunan jalan usaha tani dan irigasi pertanian yang dibiayai dana desa telah memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar kecamatan dan memperpendek waktu pengiriman. Petani melaporkan adanya penurunan biaya transportasi hingga 25%, serta peningkatan frekuensi jual beli hasil pertanian. Infrastruktur produktif ini juga memperluas akses petani terhadap koperasi desa, sehingga sirkulasi ekonomi menjadi lebih cepat.

#### Dukungan Modal Usaha Mikro.

Sebagian dana desa dialokasikan untuk program pemberdayaan pelaku usaha kecil, seperti pengrajin bambu, pengolah makanan tradisional, dan peternak unggas. Menurut hasil wawancara, pelatihan manajemen usaha dan bantuan modal bergulir dari pemerintah desa mampu meningkatkan omzet usaha mikro rata-rata 15–20% dibanding tahun sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, 2025) yang menegaskan bahwa dana desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Secara komparatif, hasil penelitian ini mendukung temuan Sartika, Wahyuni Mustafa, dan Hadrah (2020) yang menunjukkan bahwa dana desa berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Namun, penelitian di Desa Klepu memberikan tambahan temuan bahwa keberlanjutan dampak ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh keberfungsi BUMDes dan sistem pengawasan partisipatif, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, posisi penelitian ini memperkaya diskursus tentang efektivitas dana desa dengan menekankan dimensi kelembagaan dan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam kerangka *endogenous development*.

#### Peningkatan Lapangan Kerja dan Aktivitas Sosial Ekonomi.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menggunakan dana desa terbukti efektif menyerap tenaga kerja lokal, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kegiatan seperti pembangunan jalan dan perbaikan saluran irigasi memberikan kesempatan kerja sementara bagi warga, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran musiman. Hal ini memperkuat teori pembangunan inklusif yang menekankan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses ekonomi (Todaro, M. P., & Smith, 2015).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan manfaat ekonomi. Beberapa kelompok usaha belum memperoleh akses bantuan modal akibat keterbatasan alokasi dana dan kurangnya informasi. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Klepu belum aktif beroperasi sehingga potensi pengelolaan aset ekonomi desa belum dimaksimalkan. Padahal, keberadaan BUMDes berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Klepu telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan usaha mikro. Namun, keberlanjutan hasil ini memerlukan dukungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih kuat dan sistem pengawasan partisipatif yang berfungsi efektif.



**Tabel 1. Temuan Utama Penelitian**

Aspek Pengelolaan Dana Desa	Temuan Lapangan	Dampak terhadap Ekonomi Lokal
Perencanaan partisipatif	Melalui Musyawarah Desa, melibatkan masyarakat dan BPD	Kegiatan sesuai kebutuhan lokal (jalan usaha tani, modal usaha mikro)
Transparansi	Informasi dipublikasikan melalui papan dan media sosial	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
Kapasitas aparatur	Masih perlu peningkatan kompetensi dan digitalisasi laporan	Efisiensi dan akuntabilitas belum optimal
Partisipasi masyarakat	Aktif di tahap perencanaan, rendah di tahap evaluasi	Pengawasan belum maksimal
Dampak ekonomi	Peningkatan pendapatan usaha mikro 15–20%, infrastruktur produktif	Manfaat belum merata, BUMDes belum berfungsi optimal

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan (2025)

Berdasarkan hasil analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Klepu ditentukan oleh keterpaduan antara tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipasi masyarakat yang aktif, serta keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Kebijakan dana desa terbukti telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, dampak yang lebih signifikan hanya dapat tercapai apabila prinsip good governance dijalankan secara konsisten, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

Temuan ini menguatkan teori pembangunan ekonomi lokal (*endogenous development*) yang dikemukakan oleh (Hidayatullah, R., & Putra, 2024); (Hendrajaya et al., 2022) bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersumber dari potensi, partisipasi, dan kreativitas masyarakat lokal itu sendiri. Dalam konteks Desa Klepu, pembangunan ekonomi lokal tidak hanya memerlukan pembangunan fisik, tetapi juga transformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang*, dapat disimpulkan bahwa tata kelola dana desa telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek kapasitas aparatur, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan lembaga desa, sehingga program yang dijalankan relatif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi lokal. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur produktif, seperti jalan usaha tani dan irigasi, serta pemberdayaan usaha mikro terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, efisiensi distribusi hasil pertanian, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi desa.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kemampuan teknis aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan, minimnya pengawasan sosial, serta belum berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal secara maksimal.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa di masa mendatang memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi, serta revitalisasi kelembagaan ekonomi desa. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan dana desa sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.



Dari sisi implikasi kebijakan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi aparatur desa, digitalisasi tata kelola keuangan, serta penguatan fungsi BUMDes sebagai pilar ekonomi desa dalam jangka panjang. Sementara dari sisi kontribusi akademik, temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan di wilayah pedesaan lain untuk menguji model efektivitas pengelolaan dana desa dengan variabel kelembagaan dan sosial ekonomi yang lebih beragam, sehingga dapat memperkaya diskursus tentang tata kelola keuangan desa dan pembangunan ekonomi lokal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, F. A., & K. (2023). Does Expenditure Structure Affect Rural Poverty Alleviation in Indonesia? The Role of Village Fund Management. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, v8(1).
- Alfareza, T. Y., Dewi, K., Amelia, T. A., Mubarok, S., & R. (2025). Effectiveness of Village Funds on Poverty Rate, Human Development Index, and Open Unemployment Rate 2019-2024 In East Java Province. *Indonesian Journal of Development And Economics*.
- Ashsifa, I., Nur Hidayanti, A., & Mulyani, U. R. (2023). The Effectiveness of Village Fund Management: Accountability, Transparency and Community Participation. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 107-121.
- Fatma, B., Suryaningtyas, D., & ... (2021). Pengaruh Kepuasan Kerja, Stres Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pg. Kebon Agung Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa* .... <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JRMM/article/view/5392>
- Hendrajaya, H., Syamsul Hadi, Henry Yuliamir, Dyah Palupiningtyas, & Samtono, S. (2022). Reviewing Employee Work Objectives From Compensation, Facilities and Work Environment, The Affect. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 2(2), 133-142. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v2i2.438>
- Hidayatullah, R., & Putra, P. (2024). Peran Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Pedesaan. *Jurnal Economina*, v4(6).
- Madjid, T., Waisitiono, S., Supriatna, T., & Prabowo, H. (2023). Model of effective and efficient village fund management policy in Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, v3(4).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Najaoan, G., Laloan, C., & Kandori, I. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tountimomor Kecamatan Kakas Barat. *Literacy: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, v4(2).
- Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, V10(2), 429-440.
- Sartika, S., Wahyuni Mustafa, S., & Hadrah, H. (2020). Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, v1(4).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Wahyudi, D., Azwari, P. C., Alfajr, A., & Septiani, S. D. (2018). Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan Halal Center Industry. *SNKN : Simposium Nasional Keuangan Negara* , 718-743.
- Waskito, W., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 24(1), 23. <https://doi.org/10.33370/jpw.v24i1.772>
- Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1).

